

**Penguatan Karakter Antikorupsi dalam Meningkatkan Kompetensi  
Kewarganegaraan Peserta Didik**

**Pramudyasari Nur Bintari<sup>1</sup>, Dwi Endah Kurniasari<sup>2</sup>**

**Weli Agus Setiawan<sup>3</sup>, Yollanda Octavitri<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Pelayaran Banten

*pramudyasarinur@poltekpel-banten.ac.id<sup>1</sup>, endahkurniasari049@gmail.com<sup>2</sup>,*

*weliagussetiawan87@gmail.com<sup>3</sup>, land.vitri90@gmail.com<sup>4</sup>*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of anti-corruption education in enhancing the civic competence of cadet students at the Banten Maritime Polytechnic. Anti-corruption education is considered essential in shaping character, integrity, and professional ethics of cadets as future seafarers and responsible citizens. The study employs a descriptive qualitative approach supported by simple quantitative data. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review involving Diploma III cadets enrolled in Pancasila Education and Citizenship Education courses. The findings indicate that cadets' perceptions of anti-corruption education are positive, as reflected in their understanding of values such as honesty, responsibility, discipline, and social awareness. The implementation of anti-corruption education is carried out through curriculum integration and the reinforcement of e-learning on Basic Anti-Corruption Knowledge and Integrity via the KPK platform. Out of 197 cadets, 58% successfully completed the e-learning within a maximum period of one semester. These findings demonstrate an improvement in civic competence, particularly in the knowledge dimension, and support the strengthening of anti-corruption character through learning processes and a sustainable cadet mentoring system that aligns with the demands of national maritime vocational education.*

**Keywords : anti-corruption education, civic competence, cadets, vocational education.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan cadet mahasiswa di Politeknik Pelayaran Banten. Pendidikan antikorupsi dipandang penting dalam pembentukan karakter, integritas, dan etika profesional taruna sebagai calon pelaut dan warga negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif sederhana. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap taruna Diploma III pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi taruna terhadap pendidikan antikorupsi berada pada kategori positif, ditandai dengan pemahaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian. Implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan melalui insersi pembelajaran serta penguatan e-learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas pada platform KPK. Dari 197 taruna, sebanyak 58% berhasil menyelesaikan e-learning dalam waktu maksimal satu semester. Temuan ini menunjukkan peningkatan kompetensi kewarganegaraan pada aspek pengetahuan serta mendukung pembentukan karakter antikorupsi melalui pembelajaran dan sistem pengasuhan taruna secara berkelanjutan dan relevan dengan tuntutan pendidikan vokasi maritim nasional Indonesia saat ini.

**Kata kunci: pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, kompetensi kewarganegaraan**

## PENDAHULUAN

Pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan tahapan strategis dalam proses pembentukan kepribadian peserta didik setelah melewati jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada fase ini, mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk menguasai kompetensi akademik dan keterampilan profesional, tetapi juga dituntut memiliki karakter yang kuat, integritas moral, serta kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Kristina et al., 2024). Setiap perguruan tinggi idealnya memiliki pola pembentukan karakter yang dirancang secara sistematis dan disesuaikan dengan visi, misi, serta karakteristik institusi masing-masing (Rodin et al., 2025). Pendidikan karakter di perguruan tinggi menjadi kelanjutan sekaligus penguatan dari nilai-nilai moral yang telah ditanamkan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan dan mengoptimalkan karakter mahasiswa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ali et al., 2025). Pendidikan karakter yang berlangsung secara berkesinambungan diyakini mampu membentuk generasi bangsa yang berkepribadian unggul, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan sosial dan kewarganegaraan yang memadai. Pendidikan karakter yang diperoleh sejak pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi dapat mendorong terbentuknya anak-anak bangsa yang memiliki kepribadian unggul sebagaimana diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional (Kurniawati et al., 2023). Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer pengetahuan kognitif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap, nilai, dan perilaku peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk pendidikan karakter yang memiliki relevansi tinggi dengan tantangan kebangsaan saat ini adalah pendidikan antikorupsi (Karim, 2023). Korupsi merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta melemahkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial (Angkat & Koto, 2024). Fenomena korupsi telah menjadi isu nasional dan internasional yang memerlukan penanganan secara komprehensif. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi harus disertai dengan langkah preventif melalui pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas sejak dini.

Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi (Indriasari et al., 2020). Regulasi ini menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Implementasi kebijakan tersebut bertujuan membentuk karakter mahasiswa agar memiliki sikap antikorupsi yang tercermin dalam perilaku akademik maupun kehidupan sosial. Sebagai tindak lanjut, pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke

dalam mata kuliah yang relevan, seperti Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai solusi strategis mengingat proses penyusunan kurikulum khusus memerlukan waktu yang cukup Panjang (Indriasari et al., 2020).

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 menunjukkan peningkatan skor menjadi 37 dari 100 dan perbaikan peringkat global, realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran hukum dan etika masih sering terjadi di masyarakat. Beragam kasus pencurian, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya yang diberitakan oleh media massa mencerminkan lemahnya internalisasi nilai karakter, khususnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial (Samion & Thomas, 2024). Lebih memprihatinkan lagi, sebagian pelaku berasal dari kalangan usia muda yang seharusnya menjadi agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan karakter antikorupsi masih sangat diperlukan, terutama di lingkungan pendidikan tinggi.

Selain itu, masih ditemukannya berbagai pelanggaran sebagai warga negara menunjukkan bahwa kompetensi kewarganegaraan mahasiswa belum sepenuhnya terbentuk secara optimal (Siti Fadilahtul Hidayah & Aos Kuswandi, 2024). Kompetensi kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta disposisi atau karakter kewarganegaraan yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Ketidaksiapan mahasiswa dalam memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai warga negara dapat berdampak pada munculnya perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Dalam konteks tersebut, penguatan karakter antikorupsi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Politeknik Pelayaran Banten sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan cadet mahasiswa yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga berintegritas dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat (Zainudin Hasan et al., 2024). Penguatan karakter antikorupsi diharapkan mampu membentuk taruna dan taruni yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki kesadaran hukum dan sosial yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penguatan karakter antikorupsi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai persepsi, pelaksanaan, serta dampak pendidikan antikorupsi terhadap kompetensi kewarganegaraan cadet mahasiswa Politeknik Pelayaran Banten. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan karakter antikorupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif dalam mewujudkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap menjadi warga negara yang kompeten.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan penekanan pada kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif sederhana

(Sugiono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena penguatan karakter antikorupsi dan kompetensi kewarganegaraan tidak dapat sepenuhnya diukur secara numerik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap persepsi, pengalaman, dan makna yang dibangun oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial dari sudut pandang informan dalam konteks alamiah (Sugiono, 2020). Subjek penelitian adalah cadet mahasiswa Politeknik Pelayaran Banten, yaitu cadet mahasiswa semester II Program Studi Permesinan Kapal pada mata kuliah Kewarganegaraan dan cadet mahasiswa semester I Program Studi Manajemen Transportasi Laut pada mata kuliah Pancasila. Subjek dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam mata kuliah yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder (Creswell, J. W, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terbuka terhadap 20 narasumber, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran dan aktivitas kampus. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman taruna secara mendalam, sedangkan dokumentasi dan studi pustaka berfungsi sebagai data pendukung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiono, 2020). Proses ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Banten sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang memiliki karakteristik pembinaan taruna berbasis kedisiplinan, sistem asrama, serta Pola Hidup Sistem Taruna (PHST). Karakteristik tersebut menjadikan Politeknik Pelayaran Banten sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi dan penguatan pendidikan karakter antikorupsi. Pendidikan di lingkungan pelayaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis dan profesional, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara dan calon pelaut profesional (Laju et al., 2025). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dipandang sebagai bagian integral dari pengembangan kompetensi kewarganegaraan taruna (Karim, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana untuk memperkuat analisis. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter dan nilai antikorupsi tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka-angka statistik, melainkan memerlukan pemaknaan mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan praktik sosial yang berlangsung dalam kehidupan taruna. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana pendidikan antikorupsi diimplementasikan, dipersepsi, dan diinternalisasikan oleh cadet mahasiswa dalam konteks pembelajaran dan kehidupan kampus.

Subjek penelitian adalah cadet mahasiswa Politeknik Pelayaran Banten, khususnya cadet mahasiswa semester II Program Studi Permesinan Kapal pada mata kuliah Kewarganegaraan dan cadet mahasiswa semester I Program Studi Manajemen Transportasi Laut pada mata kuliah Pancasila. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mata kuliah tersebut secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dan antikorupsi (Zainudin Hasan et al., 2024). Selain itu, subjek penelitian juga mencakup dosen pengampu mata kuliah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan taruna. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder yang berasal dari dokumen institusi dan literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati pelaksanaan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran di kelas, aktivitas taruna di lingkungan asrama, serta berbagai kegiatan kedinasan dan kemahasiswaan lainnya. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai pembiasaan nilai-nilai disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang menjadi bagian dari pendidikan karakter antikorupsi. Observasi juga memungkinkan peneliti memahami interaksi sosial antara taruna, dosen, dan pengasuh dalam membentuk iklim pendidikan yang berorientasi pada integritas (Zainudin Hasan et al., 2024).

Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam terhadap 20 orang taruna Diploma III sebagai narasumber utama. Wawancara bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pemahaman taruna mengenai pendidikan antikorupsi yang mereka terima selama proses pendidikan. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai bagaimana taruna memaknai pendidikan antikorupsi, sejauh mana nilai-nilai tersebut dipahami dan diterapkan, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses internalisasi nilai antikorupsi. Selain taruna, wawancara juga dilakukan dengan dosen pengampu untuk memperoleh perspektif mengenai strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan antikorupsi.

Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikaji meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus mata kuliah, modul e-learning antikorupsi, laporan akademik, serta dokumentasi kegiatan taruna. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, kebijakan pendidikan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi, dan kompetensi kewarganegaraan. Data dari dokumentasi dan studi pustaka ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis serta memperkuat validitas temuan penelitian (Karim, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar cadet mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap pendidikan antikorupsi yang diterapkan di Politeknik Pelayaran Banten. Taruna memahami bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya bersifat normatif atau teoritis, tetapi merupakan bekal penting dalam membentuk sikap profesional dan etika kerja di masa depan. Kesadaran ini muncul

karena taruna menyadari bahwa profesi pelaut sangat rentan terhadap praktik-praktik penyimpangan apabila tidak dibekali dengan integritas yang kuat. Pendidikan antikorupsi dipandang sebagai sarana untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sejak dini.

Implementasi pendidikan antikorupsi dilakukan melalui integrasi materi pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan serta diperkuat dengan pemanfaatan *e-learning* melalui *Anti-Corruption Learning Center (ACLC)* Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui pendekatan ini, taruna memperoleh pemahaman konseptual mengenai korupsi, dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta peran warga negara dalam mencegahnya (E. Kurniawati & Nurbaiti, 2020). Pembelajaran berbasis *e-learning* memberikan fleksibilitas waktu dan akses materi yang lebih luas, meskipun memerlukan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik dari taruna.

Data penelitian menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kelulusan taruna dalam mengikuti *e-learning* antikorupsi pada beberapa periode akademik. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beban akademik, intensitas pendampingan dosen, serta motivasi belajar taruna. Kelas yang memperoleh pendampingan lebih intensif dan memiliki budaya belajar yang baik menunjukkan hasil yang lebih optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan materi, tetapi juga oleh strategi pembelajaran, pendampingan, dan iklim akademik yang mendukung.

Dari perspektif kompetensi kewarganegaraan, pendidikan antikorupsi memberikan kontribusi positif terhadap penguatan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap taruna. Secara kognitif, taruna menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai nilai-nilai Pancasila, etika publik, dan prinsip antikorupsi (Karim, 2023). Dari aspek keterampilan, taruna terbiasa menjalankan tugas secara disiplin, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam lingkungan yang terikat oleh aturan ketat. Sementara itu, dari aspek sikap, nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap norma terus dibentuk melalui sistem pembinaan taruna yang terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di Politeknik Pelayaran Banten telah diimplementasikan secara sistematis dan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter serta kompetensi kewarganegaraan cadet mahasiswa. Meskipun demikian, upaya penguatan masih perlu terus ditingkatkan melalui optimalisasi integrasi kurikulum, peningkatan kualitas pendampingan pembelajaran, serta pengembangan strategi pendidikan karakter yang lebih kontekstual dan berkelanjutan agar nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi secara mendalam dan konsisten dalam kehidupan taruna.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di Politeknik Pelayaran Banten, dapat disimpulkan bahwa pendidikan antikorupsi

merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan integritas cadet mahasiswa/i sebagai calon pelaut dan warga negara. Persepsi taruna terhadap pendidikan antikorupsi menunjukkan kesadaran yang baik bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang harus dicegah melalui pendidikan sejak dini. Penanaman nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan kepedulian, dipahami sebagai bagian penting dalam membentuk sikap moral dan etika profesional yang harus diterapkan baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Implementasi pendidikan antikorupsi di Politeknik Pelayaran Banten telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui insersi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta diperkuat dengan pemanfaatan e-learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas pada platform KPK. Selain itu, sistem pengasuhan taruna dan penerapan Pola Hidup Semi Taruna turut mendukung pembiasaan karakter antikorupsi melalui kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% taruna berhasil menyelesaikan e-learning antikorupsi dalam waktu maksimal satu semester, yang menandakan tercapainya kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) pada sebagian besar taruna. Meskipun demikian, penguatan pendidikan antikorupsi perlu terus ditingkatkan. Pendidikan antikorupsi disarankan tidak hanya difokuskan pada mata kuliah tertentu, tetapi juga diintegrasikan dalam mata kuliah lain dan kegiatan praktik. Pemanfaatan platform e-learning KPK yang efektif perlu dilanjutkan dengan pendampingan yang lebih intensif agar seluruh taruna mampu menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Firmansyah, F., Himayaturohmah, E., & Al Ghozali, M. I. (2025). Integration of Adab Values in Higher Education Curriculum (KPT 2024) Based on Outcome-Based Education (OBE). *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 7(3), 220–237. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v7i3.7942>
- Angkat, I. S., & Koto, I. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1841–1852. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6736>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Indriasari, R., Medrofa, D. E. K., Karmila, C. L., Basir, H., Widiatmoko, C., & Kusuma, G. W. (n.d.). *TREN PENELITIAN TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF ANALISIS BIBLIOMETRIK*.
- Karim, A. (2023). PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 25. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.506>

- Kristina, P. C., Putri, S. A. R., & Nita, P. (2024). *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Karakter Siswa*.
- Kurniawati, D., Farida, U., & Murtafiah, N. H. (n.d.). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH*.
- Kurniawati, E., & Nurbaiti, S. (n.d.). *INKLUSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI PERGURUAN TINGGI*.
- Laju, I. K., Kurniadi, D., Nugraha, Y., Syukri, M., & Sultan, S. (2025). Pengembangan Media Promosi Layanan Diklat melalui Podcast guna Meningkatkan Kinerja Organisasi Badan Layanan Umum (BLU) di Politeknik Pelayaran Malahayati: Development of Promotion Media for Training Services through Podcasts to Improve the Performance of Public Service Agency (BLU) Organizations at the Malahayati Maritime Polytechnic. *SABIQ: Jurnal Sosial dan Bidang Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.62554/ew9xeq67>
- Rodin, R., Hidayah, J., & Harmi, H. (2025). *Manajemen Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*.
- Samion, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas Yang Baik Bagi Mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 96–100. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137>
- Siti Fadilahtul Hidayah & Aos Kuswandi. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriptif di Universitas Islam 45 Bekasi. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 1(2), 36–48. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3755>
- Sugiono. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. San. Alfabeta.
- Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, & Arya Dwi Yuda. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>